



## DINAMIKA ISLAM DI YOGYAKARTA PRA-PASCA KEMERDEKAAN: ANALISIS HISTORIS ATAS RELASI KERATON DAN MUHAMMADIYAH

Aisyah Sacra Ali, Nabita Syifauroh Rahmah

Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang; [aisyahllg893@gmail.com](mailto:aisyahllg893@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang; [nabitasyifaurohrahmah@gmail.com](mailto:nabitasyifaurohrahmah@gmail.com)

Received date: 7 Desember 2025; Accepted date: 11 Juni 2026; published date 30 Juni 2026;

### Abstract

*This study examines the dynamics of Islamic development in Yogyakarta through a historical analysis of the relationship between the Yogyakarta Palace and Muhammadiyah during the pre- and post-independence periods. The research is grounded in the need to understand how traditional authority and modernist Islamic movements jointly shaped the religious character of Yogyakarta society. The study aims to describe the patterns of interaction between these two institutions and to identify their influence on socio-religious developments in the region. A historical research method with a qualitative approach was employed, involving archival exploration, literature review, and descriptive-analytical data interpretation. The findings indicate that in the pre-independence era, the Yogyakarta Palace and Muhammadiyah maintained a harmonious relationship through cultural adaptation and selective acceptance of religious reform. In the post-independence era, this relationship evolved into a more structural collaboration, reflected in joint contributions to education, health services, and social development. The study concludes that the interaction between the Palace and Muhammadiyah has been a crucial factor in shaping the distinctive model of Islam in Yogyakarta—modern, rational, yet firmly rooted in Javanese cultural tradition.*

**Keywords:** Yogyakarta Palace, Muhammadiyah, Indonesian Islamic history, modernity, tradition, socio-religious dynamics.

## Pendahuluan

Sejarah perkembangan Islam di Yogyakarta memiliki posisi strategis dalam membaca dinamika keislaman di Indonesia, terutama karena wilayah ini menjadi ruang pertemuan antara kekuatan tradisi keraton dan gerakan pembaruan Islam modern. Sejak awal abad ke-20, Yogyakarta tidak hanya berperan sebagai pusat kebudayaan Jawa, tetapi juga sebagai laboratorium sosial bagi lahirnya gerakan Islam modernis, salah satunya Muhammadiyah. (Utami & Tri, 2025) Pertemuan antara dua entitas tersebut—Keraton Yogyakarta yang berkarakter tradisional-monarkis dan Muhammadiyah yang bercorak rasional-modernis—menghasilkan dinamika sosial-keagamaan yang unik. Relasi keduanya membentuk lanskap keislaman yang pada masa pra hingga pasca kemerdekaan berpengaruh langsung terhadap perkembangan pendidikan, sosial, dan politik keagamaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Meskipun memiliki latar ideologis dan orientasi keagamaan yang berbeda, hubungan antara Keraton Yogyakarta dan Muhammadiyah tidak semata-mata ditandai oleh pertentangan, melainkan juga menunjukkan pola keharmonisan dan akomodasi yang kuat. Keharmonisan tersebut tercermin dalam kemampuan kedua institusi untuk membangun ruang dialog dan kerja sama berdasarkan kepentingan yang lebih luas, yakni penguatan identitas keislaman dan kemajuan masyarakat Yogyakarta. Keraton tetap mempertahankan tradisi dan nilai-nilai budaya Jawa yang telah mengakar, sementara Muhammadiyah menjalankan agenda pembaruan melalui pendidikan, dakwah, dan pelayanan sosial tanpa secara langsung menegasikan eksistensi budaya local.

Keharmonisan ini menunjukkan bahwa relasi Keraton Yogyakarta dan Muhammadiyah merupakan bentuk interaksi sosial yang bersifat integratif. Perbedaan paradigma keagamaan tidak berkembang menjadi konflik terbuka, melainkan dikelola melalui sikap saling menghormati, toleransi, dan pengakuan terhadap peran masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Keharmonisan tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam menjaga stabilitas sosial-keagamaan di Yogyakarta, sekaligus melahirkan model keberislaman yang moderat, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, pengalaman historis Yogyakarta memperlihatkan bahwa perjumpaan antara tradisi dan modernitas dalam Islam tidak selalu menghasilkan ketegangan, tetapi dapat melahirkan sintesis yang konstruktif dan berkontribusi bagi penguatan kohesi sosial masyarakat.

Permasalahan utama yang sering muncul dalam kajian hubungan Keraton dan Muhammadiyah adalah bagaimana dua otoritas budaya-keagamaan dengan orientasi berbeda dapat hidup berdampingan, sekaligus berkolaborasi dalam membangun masyarakat. (Yusmi, 2019) Keraton memiliki basis legitimasi adat, tradisi, dan otoritas keagamaan yang terintegrasi dalam konsep *manunggaling kawula-gusti*, sementara Muhammadiyah hadir dengan pendekatan purifikasi dan modernisasi keagamaan. Isu-isu yang mengemuka antara lain ketegangan antara tradisionalisme dan modernisme, peran politik Keraton dalam mendukung perkembangan organisasi Islam, serta transformasi sosial yang terjadi sebagai dampak kemunculan lembaga pendidikan modern Muhammadiyah di lingkungan budaya Jawa yang sangat kuat menjaga tradisi. (Utami & Tri, 2025)

Selain itu, konteks pra-pasca kemerdekaan turut mempertegas dinamika tersebut. Sebelum

kemerdekaan, Muhammadiyah berkembang pesat di Yogyakarta dan mendapat legitimasi moral dari figur Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan IX, yang memiliki kedekatan historis dengan tokoh-tokoh pembaru. Pasca kemerdekaan, status Yogyakarta sebagai daerah istimewa semakin menegaskan pentingnya hubungan harmonis antara Keraton dan kekuatan organisasi Islam demi stabilitas sosial dan pembangunan daerah. Relasi ini menjadi semakin relevan seiring peran Muhammadiyah dalam pendidikan dan kesehatan yang beriringan dengan peran Keraton sebagai penjaga identitas budaya.

Penelitian tentang relasi Keraton dan Muhammadiyah telah banyak dilakukan oleh para sejarawan. Misalnya, karya Alfian (1989) mengkaji munculnya gerakan modern Islam dan menekankan peran Yogyakarta sebagai pusat intelektual Muhammadiyah. Penelitian Mulkhan (1990-an) menegaskan bahwa hubungan Keraton dan Muhammadiyah bersifat simbiotik karena masing-masing memiliki kepentingan sosial dan ideologis. Sementara itu, studi Nur Ichwan dan tim (2015) menunjukkan bagaimana Keraton tetap mempertahankan otoritas simboliknya meski menghadapi modernisasi keagamaan. Penelitian-penelitian tersebut menjadi fondasi penting untuk menggambarkan bagaimana dinamika pra hingga pasca kemerdekaan membentuk pola relasi yang tidak sekadar bersifat institusional, tetapi juga mencerminkan negosiasi budaya dan religius antara tradisi dan modernitas.

Dengan demikian, kajian mengenai dinamika Islam di Yogyakarta pra-pasca kemerdekaan melalui analisis hubungan Keraton dan Muhammadiyah menjadi penting untuk memahami bagaimana dua kekuatan dengan orientasi berbeda justru menciptakan lanskap Islam yang plural, progresif, namun tetap berakar kuat pada tradisi lokal.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian historis (*historical research*) yang yaitu suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan merekonstruksi peristiwa masa lalu secara kritis berdasarkan data dan fakta sejarah. Fokus penelitian diarahkan pada dinamika hubungan antara Keraton Yogyakarta dan Muhammadiyah dalam konteks perkembangan Islam di Yogyakarta pada masa pra hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan relasi kedua institusi tersebut secara kronologis serta memahami konteks sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya.

Penelitian ini berfokus pada pola hubungan antara Keraton Yogyakarta sebagai pusat otoritas budaya dan keagamaan tradisional, serta Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modernis. Kajian diarahkan untuk melihat proses pembentukan, perubahan, serta dampak relasi keduanya terhadap perkembangan Islam di Yogyakarta sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Dalam penelitian ini, sumber primer, berupa arsip, dokumen resmi Keraton Yogyakarta, dokumen organisasi Muhammadiyah, surat kabar sezaman, serta laporan-laporan historis yang relevan. Sedangkan Sumber sekunder, berupa buku-buku sejarah, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta biografi tokoh yang berkaitan dengan tema penelitian.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri dan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Proses ini meliputi

penelaahan terhadap arsip sejarah, dokumen organisasi, buku-buku sejarah, jurnal ilmiah, serta publikasi akademik lainnya yang berkaitan dengan Keraton Yogyakarta dan Muhammadiyah.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis historis melalui empat tahapan utama, yaitu: Heuristik, yaitu proses pengumpulan dan penelusuran sumber-sumber sejarah yang relevan. Kritik sumber (verifikasi), yaitu penilaian terhadap keaslian (autentisitas) dan kredibilitas sumber. Interpretasi, yaitu proses penafsiran makna dari fakta-fakta sejarah yang ditemukan untuk memahami hubungan sebab-akibat dan konteks peristiwa. Historiografi, yaitu penyusunan hasil penelitian dalam bentuk narasi sejarah yang sistematis, logis, dan ilmiah. Keabsahan data dalam penelitian historis ini dijaga melalui proses kritik internal dan eksternal terhadap sumber-sumber sejarah, sehingga data yang digunakan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

## **Pembahasan**

Pembahasan pada bagian ini menelusuri perkembangan relasi antara Keraton Yogyakarta dan Muhammadiyah sebagai dua aktor penting dalam dinamika Islam di Yogyakarta. Keraton, dengan basis legitimasi kultural dan religius yang telah mengakar ratusan tahun, serta Muhammadiyah sebagai gerakan modernis yang lahir pada awal abad ke-20, menghadirkan dua arus pemikiran yang berbeda namun saling memengaruhi dalam pembentukan wajah Islam lokal.

Untuk memahami perubahan relasi tersebut secara lebih komprehensif, analisis dibagi ke dalam dua periode besar: pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pembagian ini penting karena konteks sosial-politik yang berbeda pada masing-masing masa menghasilkan pola interaksi yang turut membentuk bentuk keberagaman masyarakat. Pada periode pra kemerdekaan, dinamika lebih banyak dipengaruhi oleh struktur sosial tradisional dan munculnya gagasan pembaruan Islam. Sementara pada periode pasca kemerdekaan, perubahan politik nasional, status Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa, serta ekspansi kelembagaan Muhammadiyah memunculkan pola relasi yang lebih kompleks dan kolaboratif.

### **Dinamika Islam di Yogyakarta Pra Kemerdekaan: Relasi Awal Keraton dan Muhammadiyah**

Pada masa pra kemerdekaan, Yogyakarta berada dalam lanskap sosial-keagamaan yang sangat kompleks karena menjadi titik temu antara kekuasaan tradisional yang mengakar kuat dan arus pembaruan Islam modern. Keraton Yogyakarta sejak awal berfungsi sebagai pusat otoritas politik dan kultural yang memiliki legitimasi spiritual tinggi. (M. Amin Abdullah, 2003) Struktur monarki Keraton tidak hanya mengatur tatanan pemerintahan, tetapi juga menjadi rujukan moral dan religius bagi masyarakat Jawa, bukan hanya pemerintahan, melainkan juga norma kultural dan religius. Studi terhadap tradisi Keraton menunjukkan bahwa Keraton secara konsisten memelihara adat istiadat, ritual, dan tradisi budaya Jawa, sebagai bentuk pelestarian identitas lokal di tengah perubahan zaman (Indryani et al., 2025).

Nilai-nilai seperti harmoni, keselarasan kosmis, tata krama, serta penghormatan terhadap hierarki sosial menjadi fondasi kehidupan Masyarakat, termasuk dalam praktik keagamaan yang menyatu dengan unsur budaya lokal. (Khoirul Hodayah, 2012) Keberadaan tradisi seperti ritual adat

di lingkungan Keraton menunjukkan bahwa Islam di Yogyakarta (khususnya di kalangan keratonik & masyarakat Jawa) seringkali dibingkai dalam wadah budaya lokal, bukan sebagai Islam “puritan” tanpa nuansa budaya. Kehidupan keagamaan yang berada dalam lingkup Keraton pun sarat dengan simbol-simbol budaya, ritual tradisional, dan pandangan dunia Jawa yang memadukan unsur spiritualitas dengan adat istiadat.(Al-Fajriyati, 2019)

Di tengah struktur sosial yang mapan itu, berdirilah Muhammadiyah pada tahun 1912 sebagai gerakan Islam modernis yang membawa pendekatan baru dalam beragama.(Ismail & Pranggono, 2022) Muhammadiyah hadir dengan karakter yang berbeda dari pola keberagamaan tradisional Keraton. Muhammadiyah menekankan integrasi antara nilai-nilai Islam dengan ilmu umum (“modern science”) dan menolak dikotomi antara ilmu dunia dan ilmu agama suatu pendekatan yang berbeda dari praktik keagamaan tradisional-kejawen.(Utami & Tri, 2025) Gerakan ini juga menekankan purifikasi ajaran Islam, pemurnian praktik ibadah dari unsur-unsur yang dianggap tidak berdasar, serta rasionalisasi pemahaman agama. Kehadirannya dalam masyarakat Jawa menjadi angin segar karena diiringi dengan pengembangan lembaga pendidikan modern, pelayanan kesehatan, kegiatan sosial, serta penyebaran gagasan tentang kemajuan umat melalui ilmu pengetahuan. Meskipun membawa semangat modernitas, Muhammadiyah tetap mengedepankan etika Jawa dalam interaksi sosial, menjadikannya dapat diterima lebih luas tanpa memicu ketegangan besar.

Studi historis menunjukkan bahwa relasi antara Keraton dan Muhammadiyah sejak awal lebih bersifat harmonis ketimbang antagonistik.(Mul Khan, 2016) Keraton tidak menanggapi kehadiran Muhammadiyah sebagai ancaman terhadap otoritas budaya, melainkan melihatnya sebagai mitra dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modernisasi pendidikan dan pelayanan sosial yang dibangun Muhammadiyah dipandang selaras dengan kepentingan Keraton untuk membangun masyarakat yang lebih maju dan stabil di tengah tantangan kolonialisme.(Firas et al., 2024) Sebaliknya, Muhammadiyah menjaga sikap hormat terhadap struktur sosial-budaya Jawa, sehingga kehadirannya tidak dianggap merusak tatanan yang sudah ada.

Peran penting Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan IX menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harmonisasi ini. Kedua Sultan dikenal memiliki pandangan progresif dan cukup terbuka terhadap gagasan modernisasi.(Hasan, 2006) Dukungan moral Sultan kepada Muhammadiyah menguatkan legitimasi gerakan tersebut di tengah masyarakat Yogyakarta. Pengembangan sekolah-sekolah modern Muhammadiyah serta layanan sosial seperti rumah sakit dan panti asuhan dapat berkembang pesat karena tidak menghadapi resistensi dari Keraton, bahkan mendapat apresiasi. Sikap ini menunjukkan bahwa Keraton memahami modernisasi sebagai bagian dari strategi mempertahankan integritas sosial dan memperkuat identitas daerah di tengah perubahan zaman.

Penelitian Alfian, Mul Khan, dan sejumlah sejarawan lain menegaskan bahwa hubungan Keraton dan Muhammadiyah pada masa pra kemerdekaan bersifat simbiotik. Keraton memberikan legitimasi moral dan budaya, sementara Muhammadiyah menjadi mitra strategis dalam memberikan solusi modern bagi persoalan sosial masyarakat. Harmonisasi ini menunjukkan bahwa tradisi dan modernitas bukan dua kutub yang harus saling meniadakan, tetapi bisa saling melengkapi ketika difasilitasi oleh kepemimpinan yang bijaksana.

Interaksi antara tradisi yang dijaga Keraton dan modernitas yang dibawa Muhammadiyah melahirkan dialektika sosial-keagamaan yang kreatif. Masyarakat Yogyakarta berhasil memadukan nilai-nilai lokal dengan gagasan modern secara selektif. Proses ini menghasilkan karakter Islam Yogyakarta yang khas: modern, rasional, namun tetap berakar pada budaya Jawa. Pola akulturasi selektif ini menunjukkan bahwa pembaruan Islam tidak harus terjadi melalui konflik, tetapi dapat tumbuh melalui negosiasi budaya yang bijaksana. Dengan demikian, masa pra kemerdekaan menjadi fondasi penting bagi terbangunnya hubungan harmonis Keraton–Muhammadiyah, yang kelak memengaruhi perkembangan Islam di Yogyakarta hingga periode pasca kemerdekaan dan era kontemporer.

### **Dinamika Islam di Yogyakarta Pasca Kemerdekaan: Transformasi dan Kolaborasi Keraton–Muhammadiyah**

Memasuki masa pasca kemerdekaan, lanskap sosial, politik, dan keagamaan di Yogyakarta mengalami perubahan mendasar yang berdampak langsung pada pola relasi Keraton dan Muhammadiyah. Setelah Indonesia merdeka, Yogyakarta memperoleh status sebagai Daerah Istimewa, sebuah kedudukan yang tidak hanya memberi legitimasi politik kepada Keraton, tetapi juga menempatkannya sebagai simbol stabilitas dan identitas budaya daerah. Dalam fase ini, Keraton memiliki peran strategis dalam membangun tata kelola sosial yang harmonis, memastikan keteraturan masyarakat, dan mengukuhkan nilai-nilai budaya Jawa di tengah perubahan besar yang melanda Indonesia (Ricklefs, 2012).

Di sisi lain, Muhammadiyah berkembang menjadi salah satu kekuatan sosial-keagamaan terbesar di Indonesia, dengan Yogyakarta sebagai basis intelektual, organisatoris, dan historisnya. Lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah—dari sekolah dasar hingga universitas—tumbuh pesat, demikian pula rumah sakit, panti asuhan, badan ekonomi, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Peran ini menjadikan Muhammadiyah sebagai aktor masyarakat sipil yang tidak hanya berfungsi sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen modernisasi sosial yang vital bagi masyarakat Yogyakarta.

Perubahan kondisi pasca kemerdekaan menciptakan dinamika baru dalam hubungan Keraton dan Muhammadiyah. Jika pada fase pra kemerdekaan hubungan keduanya lebih banyak ditandai harmoni kultural dan adaptasi timbal balik, maka pada periode pasca kemerdekaan berkembang relasi yang lebih struktural, sistematis, dan mengarah pada kolaborasi yang lebih kuat. Pembentukan kolaborasi ini didukung oleh kebutuhan masing-masing pihak: Keraton memerlukan mitra sosial yang mampu menggerakkan masyarakat dalam program-program pembangunan, sedangkan Muhammadiyah membutuhkan legitimasi simbolik dan jangkauan moral Keraton untuk memperluas kiprahnya dalam pendidikan, kesehatan, dan sosial-keagamaan. Sejarawan Ahmad Najib Burhani menegaskan bahwa pada periode ini Keraton membutuhkan mitra modern untuk implementasi program sosial, sementara Muhammadiyah membutuhkan legitimasi simbolik Keraton untuk memperluas pengaruhnya di masyarakat Jawa (Burhani, 2020).

Hasil kajian historis menunjukkan bahwa pola kolaborasi ini berlangsung secara bertahap. Pada awal kemerdekaan (1946-1949), Keraton berperan sebagai penyangga stabilitas politik dengan memberikan dukungan penuh terhadap Republik Indonesia, termasuk menjadi pusat

pemerintahan nasional selama masa revolusi. Dalam kondisi tersebut, Muhammadiyah ikut memperkuat ketahanan sosial masyarakat melalui lembaga pendidikan dan bantuan sosial. (Aprianto & Yulianto, 2019) Keduanya secara tidak langsung berbagi peran dalam menjaga ketertiban dan ketangguhan masyarakat Yogyakarta. Kolaborasi ini memberikan dasar kuat bagi relasi yang lebih terinstitusionalisasi pada fase berikutnya.

Di bidang pendidikan, pengaruh Muhammadiyah sangat terasa. Penyebaran sekolah-sekolah Muhammadiyah di berbagai kecamatan Yogyakarta menjadikan masyarakat semakin akrab dengan sistem pendidikan modern. (Nadlifah, 2018) Sementara itu Keraton tetap menjaga nilai-nilai budaya dan moral Jawa sebagai rujukan etis. Dalam banyak kesempatan, Keraton memberikan dukungan moral bagi kegiatan Muhammadiyah, baik melalui kehadiran Sultan dalam agenda-agenda strategis maupun melalui pengakuan formal terhadap kontribusi Muhammadiyah bagi masyarakat. Keselarasan ini memperkuat posisi Yogyakarta sebagai pusat perkembangan Islam modern di Indonesia.

Hubungan keduanya juga tampak dalam konteks sosial dan kesehatan. Rumah sakit dan layanan kesehatan Muhammadiyah menjadi instrumen penting modernisasi sosial yang diterima masyarakat tanpa resistensi budaya. Keraton yang menjaga struktur nilai harmoni turut menyambut kehadiran lembaga modern ini sebagai bagian dari upaya menyejahterakan rakyat. Kolaborasi semacam ini menggambarkan bagaimana tradisi dan modernitas dapat hidup berdampingan tanpa saling menegasikan, bahkan justru saling memperkuat.

Transformasi hubungan Keraton dan Muhammadiyah pasca kemerdekaan tidak hanya berdampak pada praktik sosial, tetapi juga menghasilkan implikasi teoretis yang signifikan dalam kajian perkembangan Islam Indonesia. Para peneliti mengobservasi bahwa relasi kedua entitas ini tidak lagi dapat dipahami melalui dikotomi lama seperti “tradisional vs modernis” atau “kultural vs rasional”. Data sejarah menunjukkan adanya pola sinkretisasi rasional—yaitu perpaduan antara rasionalitas yang diusung Muhammadiyah dan simbolisme budaya Keraton—yang menciptakan bentuk baru struktur sosial-keagamaan Yogyakarta. Perpaduan ini tidak bersifat sinkretik dalam arti teologis, tetapi lebih berupa akulturasi sosial, di mana sistem pengetahuan modern terintegrasi dengan praktik budaya lokal yang telah mengakar.

Model interaksi ini memperkaya teori perkembangan Islam Indonesia karena menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak selalu berlangsung melalui konflik atau polarisasi. Justru dalam kasus Yogyakarta, perubahan terjadi melalui negosiasi budaya dan adaptasi kreatif yang melibatkan kedua belah pihak. Keraton menyesuaikan diri dengan kebutuhan modernisasi masyarakat, sementara Muhammadiyah belajar menghargai dinamika simbolik dan nilai-nilai lokal yang dijaga Keraton. Ini menunjukkan adanya fleksibilitas budaya yang menjadi ciri khas Yogyakarta.

Selain itu, kemampuan Muhammadiyah untuk memanfaatkan modernitas tanpa memutus hubungan dengan identitas lokal menjadi faktor penting yang menguatkan kolaborasi ini. Muhammadiyah yang berasal dari Yogyakarta secara budaya memiliki kedekatan dengan nilai-nilai Jawa, sehingga pendekatan dakwahnya tidak konfrontatif terhadap tradisi lokal. Karakter ini membuatnya kompatibel dengan visi Keraton dalam menjaga keseimbangan sosial. Dari sisi teori

sejarah, fenomena ini mengindikasikan bahwa keberhasilan gerakan modernis Islam dalam suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kemampuannya membaca dan menyesuaikan diri dengan kultur lokal.

Dalam konteks politik daerah, kolaborasi Keraton dan Muhammadiyah memperkuat kestabilan sosial Yogyakarta. Keberadaan Keraton sebagai simbol persatuan, ditambah dengan jaringan pendidikan dan sosial Muhammadiyah yang masif, menciptakan struktur sosial yang kuat dan adaptif. Hubungan ini juga menempatkan Yogyakarta sebagai model relasi harmonis antara kekuatan tradisional dan gerakan modernis di Indonesia, berbeda dari beberapa daerah lain yang mengalami ketegangan akibat benturan tradisi dan modernitas.

Secara keseluruhan, dinamika pasca kemerdekaan menampilkan hubungan Keraton–Muhammadiyah sebagai hubungan yang tidak stagnan, tetapi terus berkembang mengikuti konteks zamannya. Keduanya bersama-sama membentuk karakter Islam Yogyakarta yang modern, rasional, berorientasi sosial, namun tetap menghormati tradisi dan nilai-nilai budaya Jawa. Model relasi ini tidak hanya menjadi fondasi bagi perkembangan Islam lokal, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi pemahaman mengenai bagaimana modernitas Islam dapat berkembang melalui dialog dan kolaborasi, bukan melalui polarisasi.

## Kesimpulan

Studi ini menyimpulkan bahwa perkembangan Islam di Yogyakarta dibentuk oleh relasi simbiotik antara Keraton dan Muhammadiyah, yang berevolusi dari harmoni kultural pra-kemerdekaan menjadi kolaborasi struktural pasca-kemerdekaan. Fenomena ini meruntuhkan dikotomi tradisional-modernis dengan menunjukkan akulturasi kreatif di mana modernitas Islam terintegrasi secara harmonis dengan tradisi lokal

## Referensi

- Al-Fajriyati, M. I. (2019). Pengaruh Tradisi Sekatenan Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat Yogyakarta. *Khazanah Theologia*, 1(1), 40–46. <https://doi.org/10.15575/kt.v1i1.7126>
- Aprianto, I. D., & Yulianto, A. E. (2019). ASKAR PERANG SABIL DALAM REVOLUSI FISIK DI YOGYAKARTA TAHUN 1945-1949. *Walasuji: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 10(2), 175–184. <https://doi.org/10.36869/wjsb.v10i2.5>
- Burhani, A. N. (2020). Torn between Muhammadiyah and Ahmadiyah in Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 48(140), 60–77. <https://doi.org/10.1080/13639811.2019.1663678>
- Firas, M. F., Wan Zakaria, W. F. A., & Salleh, K. (2024). Muhammadiyah dan Peranannya dalam Menegakkan Keadilan di Indonesia. *Ulum Islamiyyah*, 36(03), 50–62. <https://doi.org/10.33102/uij.vol36no03.608>
- Hasan, N. (2006). Modernisasi Islam dan Politik Identitas: Muhammadiyah di Yogyakarta. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 44, 2, 273–298.
- Imawan, D. H., & Usman Jaja, B. U. J. (2024). THE CONTRIBUTION OF BENDORO PANGERAN HANGEBEHI (BPH) SANDIYO PUTERA AMANGKURAT IV TO THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC CIVILIZATION IN THE SULTANATE OF

- YOGYAKARTA-INDONESIA IN THE 18-19TH CENTURY. *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, 29(1), 27. <https://doi.org/10.32332/akademika.v29i1.7768>
- Indryani, D. A., Martha, N., & -, K. (2025). Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat: Dhaup Ageng Sebagai Bentuk Pelestarian Budaya. *MOZAIK Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 16(1), 82–104. <https://doi.org/10.21831/mozaik.v16i1.78906>
- Ismail, F., & Pranggono, B. (2022). Kajian Kampung Islam Kauman di Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta. *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*, 2(2), 543–549. <https://doi.org/10.29313/bcsurp.v2i2.3624>
- Khoirul Hodayah, A. A. R. (2012). ISLAM DAN BUDAYA MASYARAKAT YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SEJARAH. *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)*. <https://doi.org/10.18860/el.v0i0.2019>
- M. Amin Abdullah. (2003). Islam, State and Society in Indonesia: Local Politics in Yogyakarta. *Al-Jami'ah*, 2, 353–370.
- Mulkhan, A. M. (2016). Muhammadiyah dan Keraton Yogyakarta: Relasi Sosial-Keagamaan dalam Sejarah. *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10, 2, 221–240.
- Nadlifah, N. (2018). Muhammadiyah dalam Bingkai Pendidikan Humanis ( Tinjauan Psikologi Humanistik). *Al-Bidayah : Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.14421/al-bidayah.v8i2.9080>
- Ricklefs, M. C. (2012). *Islamisation and Its Opponents in Java*. NUS Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1qv3fh>
- Utami, Y., & Tri, Y. A. (2025). Muhammadiyah And Islamic Education Reform. *JURNAL PEDAGOGY*, 18(1), 53–63. <https://doi.org/10.63889/pedagogy.v18i1.313>
- Yusmi, E. (2019). ISLAMIC VALUES FROM THE WORK OF BUILDING CULTURE OF KARATON YOGYAKARTA. *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research*, 3(1), 46–53. <https://doi.org/10.14421/skijier.2019.2019.31.05>

